

Determinasi *Related Party Transactions* pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2017-2018

Sevia Dian Saraswati¹, Satria Yudhia Wijaya², Akhmad Saebani³
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

Abstrak

Pengujian dilakukan untuk mencari tahu pengaruh dari variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Eksternal dan Struktur Kepemilikan terhadap *Related Party Transactions* Sampel pada penelitian ini berjumlah 88 perusahaan sektor manufaktur. Perusahaan tersebut diperoleh dari *IDX Fact Book* periode 2017-2018. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan signifikansinya 5% Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *related party transactions*, (2) komite audit berpengaruh secara signifikan negatif terhadap *related party transactions*, (3) kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap *related party transactions*, (4) struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap *related party transactions*.

Kata Kunci: dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit eksternal, struktur kepemilikan, *related party transactions*

Abstract

This study was conducted to examine the effect of the Independent Board of Commissioners, Audit Committee, External Audit Quality and Ownership Structure on Related Party Transactions. The sample in this study involved 88 manufacturing sector companies. This company was obtained from the IDX Fact Book for the 2017-2018 period. This study uses multiple regression analysis techniques with a significance of 5%. The results of this study indicate that (1) the independent board of commissioners has no effect on related party transactions, (2) the audit committee has a significant negative effect on related party transactions, (3) the quality of the external audit has no effect on related party transactions, (4) the ownership structure has a significant positive effect on related party transactions.

Keywords: *independent board of commissioners, audit committee, external audit quality, ownership structure, related party transactions*

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya dunia bisnis dengan semakin kompleksnya kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak jarang terjadi adanya masalah keagenan. Masalah keagenan bisa menjadi masalah serius terkait dengan hubungan dua belah pihak dalam suatu kontrak. Masalah tersebut terjadi ketika didalam kontrak terdapat adanya perbedaan kepentingan atau yang biasa disebut *conflict of interest*. Menurut Villalonga dan Amit (2006) konflik keagenan di setiap negara berbeda. Konflik antara manajemen dan pemegang saham biasanya terjadi di Amerika dan Eropa, sedangkan di Indonesia biasa terjadi antara pemegang saham pengendali (mayoritas) dengan pemegang saham non pengendali (minoritas). Adanya perbedaan kepentingan merupakan masalah yang terjadi dikarenakan setiap pihak dalam hubungan kontrak memiliki kepentingan atau tujuannya masing-masing. Konflik tersebut dapat terjadi ketika masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak mempunyai ketersediaan informasi yang berbeda dimana memungkinkan pihak yang memiliki kuasa untuk membuat kebijakan akan mengambil keputusan yang dapat merugikan beberapa pihak. Hal tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti dengan praktik manajemen laba, tindakan ekspropriasi dan aktivitas *tunneling*.

Tindakan ekspropriasi dapat dilakukan melalui *related party transactions* (RPT) atau transaksi pihak berelasi. *Related party transactions* bisa juga menjadi aktivitas *tunneling* yang menurut Sari dan Sugiharto (2014:1) merupakan transfernya sumber daya keluar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. *Tunneling* ini bisa menyebabkan kerugian dikarenakan adanya transfer yang tidak wajar yang dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan beberapa pihak saja.

Menurut teori keagenan, manajemen laba, tindakan ekspropriasi dan aktivitas *tunneling* dapat diatasi melalui mekanisme *corporate governance*. Beberapa mekanisme tersebut dilakukan perusahaan dalam bentuk mekanisme internal maupun eksternal, melalui pengendalian-pengendalian dan pencegahan tindakan yang dapat merugikan pemangku kepentingan. Adanya mekanisme tersebut membuat perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan *related party transactions* yang bersifat merugikan. Mekanisme *corporate governance* dapat diimplementasikan melalui adanya dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit eksternal dan struktur kepemilikan dalam perusahaan yang tersebar.

Beberapa penelitian mengenai *related party transaction* telah dilakukan peneliti sebelumnya, mekanisme *corporate governance* menjadi salah satu faktor yang sering diteliti untuk melihat pengaruhnya terhadap *related party transactions*, dikarenakan dengan adanya mekanisme *corporate governance* yang baik dapat mengurangi tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemegang saham nonpengendali. Penelitian tersebut penelitian Lo, Wong dan Firth (2010), yang menyatakan *corporate governance* yang berkualitas bisa menghalangi adanya manipulasi harga transfer pada *related party transactions* atas penjualan. Sedangkan pada penelitian dari Siregar, dkk (2015) ditemukan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris bisa meminimalkan tindakan ekspropriasi, sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak signifikan untuk mengurangi eskpropriasi. Utama (2015) juga menemukan tidak adanya pengaruh

praktik *corporate governance* terhadap *related party transactions*, hanya tingkat pengungkapan *related party transactions* dan struktur kepemilikan yang memiliki pengaruh positif terhadap *related party transactions* pada *sales* dan *expense*. Penelitian lainnya yakni Agustinah, dkk (2019) mengenai *related party transactions* menunjukkan adanya hubungan negatif tidak signifikan antara praktik *corporate governance* terhadap besaran *related party transactions* pada *sales* dan *expense*, serta pengungkapan *related party transactions*, struktur kepemilikan dan hak arus kas yang masing-masing memiliki pengaruh signifikan positif terhadap besaran *related party transactions*. Sedangkan penelitian Herliana (2019) menjelaskan tidak terdapat pengaruh dari praktik *corporate governance* terhadap besaran *related party transactions*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan merupakan hubungan antara agen yang diberikan wewenang menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan prinsipal yaitu pihak yang memberikan mandat kepada agen dengan sumber daya yang dimilikinya. Disisi lain, didalam hubungan kontrak prinsipal dan agen terdapat kepemilikan informasi antara kedua pihak yang tidak seimbang. Dikarenakan agen sebagai eksekutor dalam menjalani mandat prinsipal mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan prinsipal, kesenjangan informasi dapat menyebabkan *asimmetry information*. Informasi luas yang dimiliki agen dapat mengakibatkan penggunaan informasi tersebut untuk kepentingan dan keinginan dalam memaksimumkan *utilitinya*. Prinsipal yang merupakan pemilik modal akan sulit mengawasi manajemen karena keterbatasan informasi yang dimilikinya. Teori agensi menyarankan pentingnya penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik untuk mengurangi *agency problem*. Teori agensi juga dicerminkan dari ketidakseimbangan kepemilikan yang ada dalam perusahaan, dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dapat menyebabkan pengambilan kebijakan dari pemegang saham pengendali yang merugikan pemegang saham non pengendali melalui aktivitas *tunneling*.

Related Party Transactions

Proses penyajian laporan keuangan tidak terlepas dari *related party transactions* atau transaksi dengan pihak berelasi. *Related Party Transaction* (RPT) biasanya terdapat pada perusahaan yang cenderung memiliki grup karena struktur kepemilikannya. Untuk mencapai tujuan tertentu, perusahaan akan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki relasi dapat berupa pembelian dan penjualan. Menurut PSAK No. 7 Tahun 2018, *related party transactions* merupakan perpindahan sumber daya, jasa ataupun kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak berelasi. Sedangkan menurut IAS 24, *related party transactions* merupakan transaksi dengan pihak yang terkait seperti pemegang saham, anggota dewan direksi, dan perusahaan afiliasi. Menurut Sari dan Sugiharto (2014:5) penyimpangan atas tindakan *related party transactions* menjadi tantangan bagi integritas perkembangan pasar modal Asia. Aktivitas *Tunneling* dapat berupa transaksi dengan pihak berelasi yang bisa menjadi kaktivitas rutin

yang dilakukan perusahaan, seperti transaksi perdagangan barang/jasa antar pihak yang berelasi maupun transaksi pihak berelasi diluar kegiatan utama perusahaan. Dampak kerugian dari penyimpangan *related party transactions* bisa menjadi sangat tinggi, sehingga pemantauan atas transaksi tersebut menjadi fokus utama reformasi tata kelola di Asia.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen memiliki tugas pengawasan atas manajemen dan memiliki fungsi atas penmantauan kebijakan *related party transactions*. Sebagai pihak yang mewakili para pemangku kepentingan, komisaris independen diharapkan dapat meyakinkan dan memastikan bahwa informasi mengenai pelaporan keuangan yang didalamnya terdapat informasi transaksi dengan pihak berelasi dapat memastikan informasi tersebut relevan. Sehingga tidak adanya transaksi dengan pihak berelasi yang terindikasi merugikan berbagai pihak. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengharuskan jumlah komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. Penelitian mengenai dewan komisaris independen yaitu penelitian dari Tambunan, dkk (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap intensitas transaksi afiliasi. Sedangkan menurut Wedari (2004) proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap aktivitas manajemen laba, dapat melalui *related party transactions*.

H1: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Related Party Transactions*.

Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam hal pengawasan secara menyeluruh. Komite audit memiliki tanggung jawab memantau laporan keuangan, mengawasi proses audit dan mengawasi sistem pengendalian internal diharapkan dapat mengurangi sifat oportunistis dari manajemen dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengharuskan jumlah komite audit minimal 3 (tiga) orang. Dengan adanya komite audit, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen yang mungkin dapat merugikan pemegang saham nonpengendali dapat diminimalisir. Dikarenakan komite audit akan melakukan proses pengawasan secara menyeluruh untuk memastikan pengendalian internal perusahaan dan pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini komite audit dapat memberikan pengaruh atas besar kecilnya tingkat transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan perusahaan, dikarenakan perusahaan akan lebih bersikap hati-hati untuk melakukan kebijakan atas transaksi tersebut. Penelitian mengenai komite audit dilakukan oleh Rahmah, Q (2013) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba melalui transaksi pihak berelasi. Dan juga penelitian dari Wedari (2004) yang menjelaskan adanya komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kegiatan manajemen laba, manajemen laba dapat dilakukan melalui transaksi dengan pihak berelasi.

H2: Komite Audit berpengaruh terhadap *Related Party Transactions*.

Kualitas Audit Eksternal

Kualitas audit eksternal merupakan suatu indikator dalam meyakinkan bahwa serangkaian prosedur audit dilaksanakan secara profesional dan akurat. Dari prosedur yang dijalankan oleh kantor akuntan publik yang memiliki kualitas dan kapabilitas diyakini dapat meminimalisir tindakan manajemen dalam melakukan *abusive related party transactions*. Dikarenakan perusahaan akan menghindari terindikasinya transaksi yang merugikan tersebut. Kualitas audit eksternal tersebut dilihat dari ukuran kantor akuntan publik yang dibagi menjadi KAP *Big-Four* dan KAP *Non Big-Four*. Penelitian mengenai kualitas audit eksternal seperti penelitian Tambunan, dkk (2016) yang menyatakan bahwa KAP *Big-Four* berpengaruh signifikan negatif terhadap intensitas *related party transactions*. Penelitian lainnya yakni penelitian Utama (2015) yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan jumlah *related party transactions* antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big-Four* dan KAP *Non Big-Four*.

H3: Kualitas Audit Eksternal berpengaruh terhadap *Related Party Transactions*.

Struktur kepemilikan

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi bisa menyebabkan pemegang saham pengendali memiliki *voting rights* kuat dan bisa terlibat jauh dalam operasional perusahaan. Dengan jumlah kepemilikan yang dimiliki, pemegang saham pengendali mempunyai kuasa untuk bernegosiasi atas kontrak perusahaan dengan para *stakeholder*. Semakin terkonsentrasinya kepemilikan, perusahaan akan cenderung melakukan *related party transaction* yang dapat mengoptimalkan keuntungan pemegang saham pengendali dan merugikan pemegang saham non-pengendali dari kebijakan yang dilakukannya. Penelitian yang dilakukan Yeh, dkk (2012) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap *related party transactions*. Sedangkan Utama (2015) yang menyatakan tidak terdapatnya pengaruh dari struktur kepemilikan terhadap *related party transactions* atas aset dan liabilitas. saham pengendali yang dapat berupa *abusive related party transactions*.

H4: Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap *Related Party Transactions*.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2018. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2017-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dapat diakses dalam situs www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan sampel dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dan terdapat di *IDX Fact Book* tahun 2017-2018
2. Perusahaan yang tidak termasuk perusahaan BUMN.
3. Perusahaan yang memiliki ekuitas positif
4. Perusahaan yang tidak *delisting* selama periode penelitian
5. Laporan keuangan yang memiliki data *corporate governance* yang lengkap

6. Laporan keuangan yang memiliki data *related party transaction*

Penelitian ini menggunakan dua kelompok variabel penelitian, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikat yang digunakan adalah *related party transactions*. Variabel bebas yang digunakan adalah mekanisme *corporate governance* melalui dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit eksternal, dan struktur kepemilikan.

1. Variabel Dependen

a. *Related Party Transaction*

Untuk mengukur *related party transaction* menurut Utama (2015) dengan membandingkan proporsi aset, liabilitas yang berhubungan dengan *related party transactions* dengan total nilai buku ekuitas perusahaan. Untuk menguji efek dari transaksi tersebut terhadap pemegang saham. Pengukuran *related party transactions* bisa melalui aset dan liabilitas yang terkait dengan *related party transactions*, bisa juga melalui penjualan dan beban yang terkait dengan *related party transactions*. Berikut rumus untuk menghitung *related party transaction*:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{RPT Asset} + \text{RPT Liability}}{\text{Equity}}$$

Dalam penelitian ini, *related party transaction* diukur menggunakan proksi aset dan liabilitas yang terkait dengan *related party transaction*, yaitu dengan menghitung jumlah dari aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pihak berelasi dibagi dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Jumlah tersebut dapat dilihat pada laporan posisi keuangan perusahaan dan catatan atas laporan keuangan. Dibandingkan dengan nilai ekuitas untuk melihat pengaruhnya terhadap pemegang saham.

2. Variabel Independen

a. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen diukur menggunakan perbandingan dari jumlah dewan komisaris independen dengan total seluruh anggota dewan komisaris. Penelitian ini menggunakan pengukuran yang dilakukan dalam penelitian Widyaningrum (2015) yang mengukur dengan menghitung jumlah komisaris independen menggunakan rumus:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Pengukuran menggunakan proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan ini untuk melihat apakah perusahaan sudah melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengharuskan jumlah komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. Dari jumlah tersebut yang kemungkinan akan berdampak pada kebijakan-kebijakan perusahaan yang diambil termasuk didalamnya mengenai *related party transactions*.

b. Komite Audit

Menurut Sihombing dan Laksito (2017) komite audit dapat diukur dengan jumlah anggota komite audit yang terdapat pada perusahaan. Pengukuran menggunakan jumlah komite audit untuk melihat apakah perusahaan telah melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyatakan bahwa jumlah komite audit minimal 3 (tiga) orang. Jumlah ini kemungkinan akan berdampak pada pengawasan terhadap perusahaan mengenai *related party transactions*.

c. Kualitas Audit Eksternal

Pengukuran kualitas audit mengikuti penelitian Masripah, dkk (2017) menggunakan proksi ukuran kantor akuntan publik, dengan memberikan peringkat 1 jika laporan keuangan perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik *Big-Four*, dan diberi nilai 0 jika laporan keuangan perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik *Non Big-Four*. Laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang berkualitas dan memiliki kapabilitas seperti KAP *Big-Four* dapat memberikan jaminan kepada pemegang saham atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Dikarenakan prosedur audit yang dijalankan oleh KAP *Big Four* memungkinkan dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

d. Struktur Kepemilikan

Variabel struktur kepemilikan diukur berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utama (2015). Dimana struktur kepemilikan dihitung menggunakan jumlah dari persentasi kepemilikan saham terbesar atau *blockholder*. *Blockholder* merupakan proporsi saham dengan kepemilikan 5% atau lebih, yang biasa disebut pemegang saham substansial. Struktur kepemilikan diukur menggunakan rumus:

$$\text{Struktur Kepemilikan} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki blockholder}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Semakin terkonsentrasi kepemilikan yang tercermin pada besarnya kepemilikan *blockholder* maka *self-dealing transaction* akan dilakukan pemegang saham pengendali yang dapat merugikan pemegang saham nonpengendali.

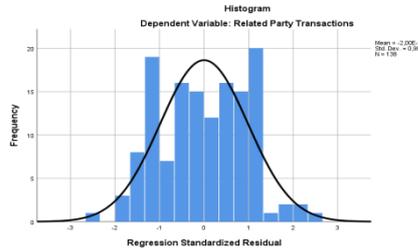
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis menggunakan uji asumsi klasik dan uji statistik deskriptif. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 25 (*Statistical Product and Service Solutions*) dan *Microsoft Office Excel*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan manufaktur menurut *IDX Fact Book* di tahun 2017-2018 berjumlah 166 perusahaan. Dengan adanya kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 88 perusahaan dengan total pengamatan 2 (dua) tahun. Sehingga didapatkan total sampel selama periode pengamatan sebanyak 176 sampel. Dengan pertimbangan tertentu, data tersebut harus mengalami proses *outlier* sebanyak 38 sampel. Sehingga sampel data yang didapatkan setelah proses *outlier* berjumlah 138 sampel

1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

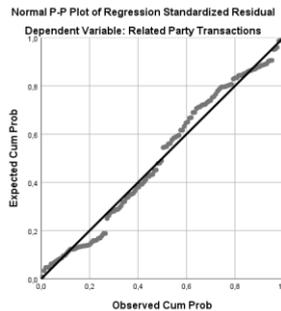
Gambar 1. Hasil Normalitas dengan Histogram



Sumber: Data diolah dari SPSS 25

Grafik histogram menunjukkan pola berdistribusi normal dilihat dari kurva yang mengikuti bentuk lonceng sempurna. Maka dapat disimpulkan, berdasarkan hasil grafik tersebut bahwa sampel dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dengan kata lain sampel yang digunakan dapat mewakili populasinya.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas dengan *Normal Probability-Plot*.



Sumber: Data diolah dari SPSS 25

Gambar 2 menunjukkan bahwa data yang berupa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan tidak ada yang melenceng jauh dari garis tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki distribusi yang normal dan dapat mewakili populasinya.

b. Uji Multikolonieritas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Dewan Komisaris Independen	,961	1,041
	Komite Audit	,933	1,072
	Kualitas Audit Eksternal	,938	1,066
	Struktur Kepemilikan	,974	1,027

Sumber: Hasil pengolahan data

Nilai VIF dari tabel tersebut yaitu variabel dewan komisaris independen sebesar 1,041, variabel komite audit sebesar 1,072, variabel kualitas audit eksternal sebesar 1,066, dan variabel struktur kepemilikan sebesar 1,027. Dengan nilai *tolerance* dewan komisaris independen sebesar 0,961, komite audit sebesar 0,933, kualitas audit eksternal sebesar 0,938 dan struktur kepemilikan sebesar 0,974.

Seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0.10. Maka dapat disimpulkan seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian memenuhi uji multikolonieritas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel independen.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

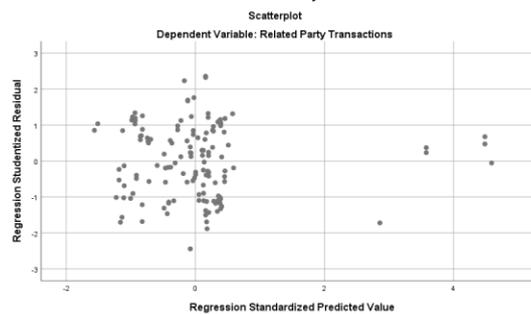
<i>Model Summary^b</i>	
<i>Durbin-Watson</i>	
1,148	

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,148, tidak adanya autokorelasi ketika nilai DW terletak pada $-2 < DW < +2$ atau $-2 < 1,059 < +2$. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah aurokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah dari SPSS 25

Berdasarkan gambar diatas, data menunjukkan bahwa seluruh variabel sudah tidak teridentifikasi adanya heteroskedastisitas yang ditunjukkan dengan data yang menyebar acak dan tidak membentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dalam grafik *scatterplot*. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi variabel *related party transactions*, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit eksternal dan struktur kepemilikan mempunyai *variance* residual data yang tetap atau homoskedastisitas

2. Uji Statistik Deskriptif

a. *Related Party Transactions*

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif *Related Party Transactions*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RPT	138	,0052	2,6758	,284613	,4397397
Valid N (listwise)	138				

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa variabel *related party transactions* memiliki nilai minimum 0.0052 atau 0.52% yang dimiliki oleh PT Ekadharna

International Tbk pada tahun 2018 yang artinya besaran RPT atas ekuitas perusahaannya hanya sebesar 0.52%. Sedangkan besaran RPT yang terbesar dimiliki oleh PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. pada tahun 2017 sebesar 2,6758 atau 267,58% atas ekuitas perusahaannya. Untuk rata-rata besaran RPT yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yaitu sebesar 0,284613 atau 28,46%. Standar deviasi dari RPT sebesar 0.4397397 atau 43.97% yang artinya nilai mean lebih kecil dari standar deviasi, sehingga terdapat penyimpangan data yang cukup tinggi atas variabel RPT sebesar 43.97% dari rata-ratanya sebesar 28,46%. atau terdapat variasi yang cukup tinggi antara nilai minimum dan maksimum selama periode pengamatan dalam penelitian.

b. Dewan Komisaris Independen

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif Dewan Komisaris Independen

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	138	,2000	,6667	,401575	,0871282
Valid N (listwise)	138				

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen memiliki nilai minimum 0,2 atau 2% yang dimiliki oleh PT Polychem Indonesia Tbk pada tahun 2018 yang hanya memiliki 1 komisaris independen dari total dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,6667 atau 66,7% dimiliki oleh PT Fajar Surya Wisesa Tbk. Tahun 2018, PT Jembo Cable Company Tbk tahun 2017, PT Kabelindo Murni Tbk. Tahun 2018, serta PT Pan Brothers Tbk tahun 2017 dan 2018. Untuk rata-rata proporsi dewan komisaris independen yaitu sebesar 0,401575 atau 40.15% artinya dari rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan sampel dalam penelitian ini telah mematuhi Peraturan OJK No 33/POJK.04/2014 yang mengharuskan perusahaan memiliki minimal 30% dewan komisaris independen dari jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0871 atau 8.71% yang artinya data terindikasi memiliki hasil sebaran data yang cukup baik, dengan penyimpangan sebesar 8.71% dari rata-ratanya sebesar 40,15%. Atau mengindikasikan bahwa adanya variasi yang kecil antara nilai minimum dan maksimum selama periode pengamatan dan tidak terdapat kesenjangan yang besar.

c. Komite Audit

Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif Komite Audit

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	138	2	3	2,96	,205
Valid N (listwise)	138				

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki nilai minimum 2, yang artinya paling sedikit perusahaan sampel dalam penelitian ini memiliki 2 komite audit dalam perusahaannya. Perusahaan yang memiliki 2

komite audit yaitu PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk. di tahun 2018, PT Panasia Indo Resources Tbk di tahun 2017 dan 2018, PT Martina Berto Tbk. di tahun 2017 dan 2018, serta PT Pelangi Indah Canindo Tbk. di tahun 2017. Sedangkan jumlah komite audit tertinggi dalam perusahaan yaitu sebanyak 3 komite audit. Rata-rata jumlah komite audit sebesar 2.96 yang artinya perusahaan sampel rata-rata memiliki jumlah komite audit yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang mengharuskan jumlah komite audit sebanyak 3 (tiga) dalam perusahaan. Standar deviasi sebesar 0,205 yang artinya data memiliki sebaran yang cukup baik dengan penyimpangan sebesar 0,205 dari rata-ratanya sebesar 2.96. Atau mengindikasikan bahwa adanya variasi yang kecil antara nilai minimum dan maksimum selama periode pengamatan dan tidak terdapat kesenjangan yang besar.

d. Kualitas Audit Eksternal

Tabel 6. Hasil Distribusi Frekuensi Kualitas Audit Eksternal

Kualitas Audit Eksternal					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Non Big 4	78	56,5	56,5	56,5
	Big 4	60	43,5	43,5	100,0
Total		138	100,0	100,0	

Sumber: Hasil pengolahan data

Sebanyak 78 perusahaan sampel atau sebesar 56,5% perusahaan menggunakan KAP *Non Big-Four* untuk mengaudit laporan keuangannya. Dan sebanyak 60 perusahaan atau sebesar 43,5% perusahaan menggunakan KAP *Big-Four* untuk mengaudit laporan keuangannya. Artinya masih banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan KAP *Non Big-Four* dalam proses audit.

e. Struktur Kepemilikan

Tabel 7. Hasil Statistik Deskriptif Struktur Kepemilikan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Struktur Kepemilikan	138	,3765	,9470	,756091	,1464411
Valid N (listwise)	138				

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai minimum untuk struktur kepemilikan yang tercermin pada kepemilikan *blockholder* yaitu sebesar 0,3765 atau 37,65% yang dimiliki oleh PT Tri Banyan Tirta Tbk pada tahun 2017, sedangkan proporsi paling tinggi struktur kepemilikan sebesar 0,9470 atau sebesar 94.7% yang dimiliki PT Kirana Megatara Tbk tahun 2018. Untuk rata-rata struktur kepemilikan yaitu sebesar 0.756091 atau 75.6% yang artinya struktur kepemilikan atas pemilik *blockholder* cukup tinggi dibandingkan kepemilikan saham dalam perusahaan yang kepemilikannya kurang dari 5%. Standar deviasi sebesar 0,1464411 atau 14.64% yang artinya data memiliki sebaran yang cukup baik dengan penyimpangan sebesar 14.64% dari nilai rata-ratanya sebesar 75.6%. Atau mengindikasikan bahwa adanya variasi yang kecil antara nilai minimum dan maksimum selama periode pengamatan.

3. Uji Statistik Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>			
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	,326 ^a	,106	,080

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel 8, nilai koefisien determinasi dari *adjusted R square* sebesar 0.080 atau 8% hal ini menunjukkan bahwa variabel *Related Party Transactions* dapat dijelaskan oleh variabel dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit eksternal, dan struktur kepemilikan sebesar 8% dan sisanya sebesar 92% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Model Regresi Berganda

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Berganda

<i>Coefficients^a</i>			
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>	
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>
1	(Constant)	1,939	1,748
	Dewan Komisaris Independen	-,111	1,293
	Komite Audit	-1,763	,558
	Kualitas Audit Eksternal	-,049	,229
	Struktur Kepemilikan	1,636	,764

a. Dependent Variable: Related Party Transactions

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada tabel 9 dapat diketahui model persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

$$\text{RPT} = 1,939 - 0,111 \text{ KI} - 1,763 \text{ KA} - 0,049 \text{ KAP} + 1,636 \text{ SK}$$

Keterangan:

- α = Konstanta
- β = Koefisien
- RPT = *Related Party Transactions*
- KI = Dewan Komisaris Independen
- KA = Komite Audit
- KAP = Kualitas Audit Eksternal
- SK = Struktur Kepemilikan

Berdasarkan model regresi tersebut dapat dilakukan analisis pengaruh masing-masing variabel yaitu Dewan Komisaris Independen (KI), Komite Audit (KA), Kualitas Audit Eksternal (KAP), dan Struktur Kepemilikan (SK) terhadap *Related Party Transactions* (RPT). Berikut merupakan interpretasi dari nilai model regresi linear berganda dalam penelitian:

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta (α) pada model regresi penelitian sebesar 1,939. Hasil tersebut menunjukkan jika variabel Dewan Komisaris Independen (KI), Komite Audit (KA), Kualitas Audit Eksternal (KAP), dan Struktur Kepemilikan (SK) bernilai tetap (konstan) atau tidak mengalami perubahan, maka nilai *related party transactions* sebesar 1,939 dimana nilai konstanta ini cukup tinggi dibandingkan nilai rata-rata *related party transactions* yang hanya sebesar 0,2846. Artinya perusahaan sampel dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi memiliki intensitas yang cukup tinggi.

2. Koefisien Regresi (β_1 KI)

Nilai koefisien regresi untuk variabel dewan komisaris independen (KI) sebesar -0,111. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 (satu) komisaris independen maka akan menurunkan *related party transactions* sebesar 0,111 atau 11,1% dengan asumsi variabel-variabel yang lainnya tetap (konstan) atau tidak mengalami perubahan. Arah koefisien negatif yang artinya terjadi hubungan yang negatif antara variabel dewan komisaris independen dengan *related party transactions*. Dengan kata lain, adanya penambahan anggota komisaris independen maka akan menurunkan tingkat transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Koefisien Regresi (β_2 KA)

Nilai koefisien regresi untuk variabel komite audit (KA) sebesar -1,763. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 (satu) anggota komite audit maka akan menurunkan *related party transactions* sebesar 1,763 dengan asumsi variabel-variabel yang lainnya tetap (konstan) atau tidak mengalami perubahan. Arah koefisien negatif yang artinya terjadi hubungan yang negatif antara variabel komite audit dengan *related party transactions*. Dengan kata lain, adanya penambahan anggota komite audit menyebabkan turunnya tingkat transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan.

4. Koefisien Regresi (β_3 KAP)

Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas audit eksternal sebesar -0,049. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan sebesar satu satuan maka akan menurunkan *related party transactions* sebesar 0,049 dengan asumsi variabel-variabel yang lainnya tetap (konstan) atau tidak mengalami perubahan. Arah koefisien negatif yang artinya terjadi hubungan yang negatif antara kualitas audit eksternal dengan *related party transactions*. Dengan kata lain, adanya peningkatan kualitas audit eksternal maka akan menurunkan tingkat transaksi dengan pihak berelasi.

5. Koefisien Regresi (β_4 SK)

Nilai koefisien regresi untuk variabel struktur kepemilikan sebesar 1,636. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan *related party transactions* sebesar 1,636 dengan asumsi variabel-variabel yang lainnya tetap (konstan) atau tidak mengalami perubahan. Arah koefisien positif yang artinya terjadi hubungan yang positif antara struktur kepemilikan dengan *related party transactions*. Dengan kata lain, adanya struktur

kepemilikan yang tinggi akan meningkatkan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi.

c. Uji Hipotesis

Tabel 10. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual

Model	Coefficients ^a		
	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
1 (Constant)		1,109	,270
Dewan Komisaris Independen	-,007	-,086	,932
Komite Audit	-,268	-3,158	,002
Kualitas Audit Eksternal	-,018	-,215	,830
Struktur Kepemilikan	,178	2,142	,034

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel 10 diatas yang merupakan hasil uji t menunjukkan nilai t_{hitung} dan tingkat signifikansi dari masing-masing variabel. Dan untuk menentukan t_{tabel} dapat dilakukan melalui perhitungan dan melihat nilai t yang terdapat dalam tabel. Dimana jumlah sampel (n) sebanyak 138 dan jumlah variabel independen (k) = 4, taraf signifikan yang telah ditentukan sebesar 0.05 atau 5%, maka dapat dihitung dengan rumus $df = (n-k-1)$, $df = (138-4-1) = 133$. Dilihat dari tabel t dengan taraf signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1.9780.

Pembahasan

Analisis pengujian pengaruh dari dewan komisaris independen terhadap *related party transactions* berdasarkan pada hasil uji statistik t didapatkan nilai sebesar -0,086, nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} sebesar $(-0.086 < 1.9780)$ dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0.05 $(0.932 > 0.05)$, maka dapat dikatakan bahwa H_1 ditolak. Dengan demikian hasil tersebut membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *related party transactions*. Sehingga tinggi atau rendahnya jumlah komisaris independen tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pengaruh atas proporsi dewan komisaris independen belum sepenuhnya terlihat dari penelitian ini, akibatnya tidak selamanya jumlah dewan komisaris independen yang banyak akan diindikasikan mengurangi transaksi dengan pihak berelasi, begitu juga dewan komisaris independen yang sedikit bisa juga tidak melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang tinggi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tambunan, dkk (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap intensitas transaksi afiliasi. Dan juga penelitian Wedari (2004) proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap aktivitas manajemen laba, dapat melalui *related party transactions*.

Analisis pengujian pengaruh dari komite audit terhadap *related party transactions* berdasarkan hasil uji statistik t didapatkan nilai sebesar -3,158, yang dimana nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} $(3,158 > 1,9780)$ dengan arah pengaruh yang negatif. Nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 $(0,002 < 0,05)$. Maka dapat dikatakan bahwa H_2 diterima. Dengan demikian hasil tersebut membuktikan bahwa jumlah komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *related party transactions*. Artinya semakin sedikitnya jumlah komite audit maka akan semakin besar jumlah transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh

perusahaan. Dan semakin tingginya jumlah komite audit dapat mengurangi transaksi dengan pihak berelasi. Komite audit dalam hal ini berperan dalam memonitor transaksi dengan pihak berelasi yang memberikan pengawasan lebih pada manajemen perusahaan untuk mengurangi tingkat transaksi dengan pihak berelasi. Prinsip responsibilitas yang dijalankan oleh komite audit dapat mengarahkan perusahaan dalam kebijakan mengenai transaksi dengan pihak berelasi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wedari (2004) yang menjelaskan adanya komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kegiatan manajemen laba, manajemen laba dapat dilakukan melalui transaksi dengan pihak berelasi. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan Rahmah, Q (2013) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba melalui transaksi pihak berelasi.

Analisis pengujian pengaruh dari kualitas audit eksternal terhadap *related party transactions* berdasarkan hasil uji statistik t didapatkan t_{hitung} sebesar -0,215, yang dimana t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,215 < 1,9780$) dengan arah pengaruh yang negatif berdasarkan nilai koefisien regresi. Nilai signifikansi sebesar 0,830 lebih besar dari 0,05 ($0,830 > 0,05$). Maka dapat dikatakan H_3 ditolak, dengan demikian hasil tersebut membuktikan bahwa kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap *related party transactions*. Artinya perusahaan yang menggunakan jasa auditor eksternal dengan KAP yang termasuk *Big-Four* dengan pengalaman yang lebih dibandingkan dengan KAP *Non Big-Four* tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Utama (2015) yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan jumlah *related party transactions* antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big-Four* dan KAP *Non Big-Four*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Tambunan, dkk (2016) yang menyatakan bahwa KAP *Big-Four* berpengaruh signifikan negatif terhadap intensitas *related party transactions*.

Analisis pengujian pengaruh dari struktur kepemilikan terhadap *related party transactions* berdasarkan hasil uji statistik t didapatkan t_{hitung} sebesar 2,142 yang dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,142 < 1,9780$) dengan arah pengaruh yang positif berdasarkan nilai koefisien regresi. Nilai signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05 ($0,034 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_4 diterima, dengan demikian hasil tersebut membuktikan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap *related party transactions*. Artinya semakin terkonsentrasinya kepemilikan *blockholder* maka dapat meningkatkan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Oleh karena itu, dengan adanya *related party transactions* yang dapat bersifat *efficient* atau *abusive*, maka diduga dengan semakin terkonsentrasinya kepemilikan dalam perusahaan akan mendorong pemegang saham pengendali untuk melakukan *self-dealing transaction* yang dapat merugikan pemegang saham non-pengendali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Songhua, dkk (2010) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dengan *related party transactions*. Serta penelitian dari Yeh, dkk (2012) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap *related party transactions*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Utama (2015) yang menyatakan tidak terdapatnya pengaruh dari struktur kepemilikan terhadap *related party transactions* atas aset dan liabilitas.

SIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui beberapa uji yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan *Related Party Transactions* dapat dijelaskan oleh variabel dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit eksternal, dan struktur kepemilikan sebesar 8%.
- b. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Related Party Transactions*.
- c. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan komite audit berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Related Party Transactions*.
- d. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap *Related Party Transactions*.
- e. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan struktur kepemilikan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *Related Party Transactions*.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh masih banyak memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi penelitian. Diantaranya keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya mengukur *related party transactions* atas aset dan liabilitas, tidak mengukur *related party transactions* atas penjualan dan beban.
- b. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak memiliki kriteria penelitian yang telah ditetapkan. Seperti beberapa perusahaan memiliki ekuitas negatif, terdapat kepemilikan Badan Usaha Milik Negara, dan tidak memiliki data *corporate governance* yang lengkap.

3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya dalam aspek teoritis ialah:

- a. Menambahkan proksi untuk mengukur *related party transactions* seperti menambahkan pengukuran atas penjualan dan beban, dikarenakan perusahaan akan lebih sering melakukan transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan beban kepada pihak berelasinya.
- b. Memperluas cakupan penelitian, yakni menggunakan sampel perusahaan yang lebih luas yang terdapat di Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui seberapa besar tingkat *related party transactions* atas perusahaan dari sektor lain
- c. Menggunakan variabel-variabel lain untuk melihat faktor yang paling mempengaruhi *related party transactions*.
- d. Menggunakan proksi yang lebih lengkap untuk mengukur *corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinah, R., Sumarno, M., & Mubarok, A. (2019). *Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Hak Arus Kas, Dan Disclosure Of RPT Terhadap Transaksi Pihak Berelasi*. Multiplier, 2(2)
- Lo, A.W.Y., Wong, R.M.K. dan Firth, M., (2010). *Can corporate governance deter management from manipulating earnings? Evidence from related-party sales transactions in China*. Journal of Corporate Finance, 16(2)
- Masripah, M., Diyanty, V., & Fitriyani, D. (2017). *Controlling Shareholder and Tax Avoidance: Family Ownership and Corporate Governance*. International Research Journal of Business Studies, 8(3).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 (2018). Pihak-Pihak Berelasi. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Rahmah, Q. (2013). *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dengan Transaksi Pihak Berelasi sebagai Intervening Variabel*. Universitas Bakrie.
- Sihombing, M. A., & Laksito, H. (2017). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Manajemen Laba*. Diponegoro Journal of Accounting, 6(4), 285-294.
- Siregar, H., Sembel, R., & Maulana, T. N. A. (2015). *Agency costs, corporate governance and ownership concentration: The case of agro-industrial companies in Indonesia*. Asian Social Science, 11(18), 311.
- Sugiharto dan Sari, C. R (2014) *Tunneling dan Corporate Governance*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Tambunan, M. E., Siregar, H., Manurung, A. H., & Priyarsono, D. S. (2016). *Determinan Intensitas Transaksi Afiliasi Pada Perusahaan-Perusahaan Dalam Grup Bisnis Di Bursa Efek Indonesia*. Journal of Technology Management, 15(2), 121-138.
- Utama, C. A. (2015). *Penentu besaran transaksi pihak berelasi: Tata kelola, tingkat pengungkapan, dan struktur kepemilikan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 12(1), 37-54.
- Villalonga, B., & Amit, R. (2006). *How do family ownership, control and management affect firm value?*. Journal of financial Economics, 80(2), 385-417.
- Wedari, L.K. (2004). *Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VII Denpasar Bali, hal. 963 -990
- Widyaningrum, V. F. dan Faisal. (2015). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan*. Diponegoro Journal of Accounting
- Yeh, Y. H., P. G. Shu, and Y. H. Su. (2012). *Related Party Transactions and Corporate Governance: The Evidence from the Taiwan Stock Market*. Pacific Basin Finance Journal, 20 (5), 755-776.